

**PENGARUH PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN
JUMLAH KOMITE AUDIT TERHADAP PROFITABILITAS
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PADA TAHUN 2014-2018**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata S.1 dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun Oleh

ARDIAN MAHARDIKA

NIM. 1505036079

**JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2019

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
Alamat : Tanjungsari II 07/V Tambakaji Ngaliyan
Nurudin, SE., MM.
Alamat : Sukodono RT 01/04 Kec. Bonang Kab. Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdra. Ardian Mahardika

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dengan ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ardian Mahardika

NIM : 1505036079

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Judul : **Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Jumlah Komite Audit Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Pada Tahun 2014-2018 .**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 5 Desember 2019

Pembimbing 1

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag

NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing 2

Nurudin, SE., MM.

NIP. 19900523 201503 1 004

HALAMAHAN PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Ardian Mahardika
NIM : 1505036079
Judul : **Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Jumlah Komite Audit Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Pada Tahun 2014-2018.**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 20 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.


Semarang, 26 Desember 2019

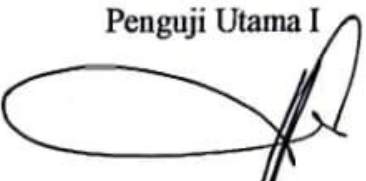
Ketua Sidang

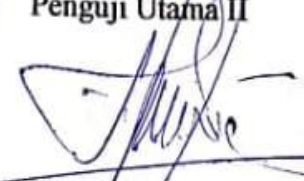
Sekretaris Sidang


Dra. Hj. NUR HUDA, M.A.
NIP. 196908301994032003
Penguji Utama I

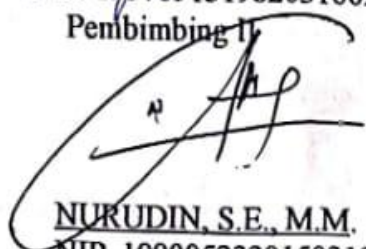



Prof. Dr. Hj. SITI MUJIBATUN, M.Ag
NIP. 195904131987032001
Penguji Utama II


HENY YUNINGRUM, S.E., M.Si.
NIP. 198106092007102005
Pembimbing I


Drs. H. HASYIM SYARBANI, M.M.
NIP. 195709131982031002
Pembimbing II


Prof. Dr. Hj. SITI MUJIBATUN, M.Ag
NIP. 195904131987032001


NURUDIN, S.E., M.M.
NIP. 199005232015031004

MOTTO

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

(1) Demi masa (2) Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian
(3) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat
menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati
kesabaran

**“Yang beriman, beramal shalih, serta mengingatkan pada kebenaran dan
kesabaran lah yang akan menang”**

PERSEMBAHAN

Dengan ini, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Almamater saya UIN Walisongo Semarang, para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan staf akademik yang telah membantu berbagai hal dalam proses perkuliahan.
2. Kepala jurusan Perbankan Syariah S1, Ibu Henny Yuningrum beserta para staff S1 Perbankan Syariah yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang berfikir keras dan sepenuh tenaga berusaha membantu akademik para mahasiswa hingga masa kelulusan.
3. Pembimbing saya, Bapak Nurudin, SE., MM. yang telah sabar membimbing dengan sebaik-baiknya dan meluangkan waktunya demi kelancaran skripsi ini hingga selesai dan Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag yang selain menjadi pembimbing juga dosen wali saya yang sudah menjadi sosok ibu yang baik selama kuliah.
4. Dosen favorit saya, Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag. Baik selama menjadi kajar maupun setelahnya selalu menjadi sosok pengayom, perhatian, dan penuh kasih sayang pada saya serta selalu dibantu dalam segala masalah hidup saya.
5. Alm. Bapak Abdul Rakhman Said, ayah saya tercinta yang telah mendidik saya dengan pelajaran hidup paling istimewa dalam hidup saya. Semoga maghfiroh Allah senantiasa merahmati beliau.
6. Ibu Sudarlin, Ibu saya tercinta yang telah merawat, mengayomi, dan menididik jiwa dan raga saya serta menjadi sosok yang kuat sebagai kepala keluarga hingga saat ini. Semoga rahmat dan maghfiroh Allah senantiasa meliputi beliau.
7. Erlina Lisa Norvita dan Romando Fermanda, kakak-kakak saya yang menjadi sosok orang tua kedua. Dua sosok yang member bantuan setiap waktu baik fisik, spiritual, finansial, ide terutama dukungan moral yang besar.

8. Segenap keluarga besar Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) Walisongo yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam suka maupun duka, tetap semangat berproses dan semoga kita bisa bertemu lagi di masa depan dengan masing-masing kisah kesuksesan.
9. Para sahabat saya dimanapun berada, terutama anggota grup Ghibah Squad (Aan, Fahmi, Sadio, Jihad, Arisqi, dan Niam) yang selalu menjadi pencerah wajah di kala duka selama di Semarang. Serta Hasan partner bisnis dan hidup saya melalui berbagai proses pendidikan teori maupun praktik hidup bersama.
10. Keluarga besar “PBAS B 2015” seperjuangan, terima kasih atas perhatian dan kehangatan kekeluargaan yang selalu tercurahkan.
11. Keluarga HMI Komisariat FEBI Walisongo yang telah menjadi tempat berproses besar saya dengan para keluarga-keluarga istimewa.
12. Teman-teman tim “KKN posko Kalibanteng Kulon” (Alfiyan, Dewi, Terry, Zulfa, Iin, Huda, Yasmin, Haryono, Tiara, Agus, Eri, Ashif, Ria, dan Ainun) yang selalu memberi semangat dan motivasi serta kebahagiaan selama melaksanakan KKN.
13. PP. Nurul Anwar Islamic Center yang telah menjadi tempat bernaung dan tempat belajar tentang kesejukan jiwa serta adab.
14. Dan yang terakhir teruntuk semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan serta motivasi sehingga karya ini dapat terselesaikan.

ARDIAN MAHARDIKA
NIM. 1505036079



DEKLARASI

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 5 Desember 2019

Deklarator



AN MAHARDIKA

NIM. 1505036079

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huru-huruf Arab Latin di dalam skripsi ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsistensi agar sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	S	ي	Y
ض	D		

Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

a = أو

ai = أي

iy = إي

ABSTRAK

Secara kualitas, bank syariah belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Menurut catatan Biro Riset Infobank, kinerja perbankan syariah tak kunjung membaik sejak 2012. Tampak dari *return on asset (ROA)* perbankan syariah yang terus menurun. Rata-rata perbankan syariah belum bisa mencapai standar ROA yang ideal, yakni 1,5%. Profitabilitas yang tak maksimal dapat disebabkan pula oleh *moral hazard*. Perlu peran organ-organ pengawasan yang independensi untuk menanganinya, seperti Dewan komisaris independen dan komite audit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen dan komite audit terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2014-2018. Variabel dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris independen dan komite audit, sedangkan profitabilitas diproksikan dengan ROA.

Populasi dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang beroperasi selama periode 2014-2018, dan telah mempublikasikan laporan keuangannya di *website* Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan jumlah sampel sebanyak 10 diambil dengan menggunakan metode nonprobabilitas (secara tidak acak) berdasarkan kriteria (*purposive sampling*). Teknik pengumpulan data diambil berdasarkan teknik dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif dan analisis inferensial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia tahun 2014-2018. Hasil ini dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 10,534 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000166 ($< 0,05$). Menurut uji t, proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia tahun 2014-2018. Hal ini dibuktikan pada uji t yang menunjukkan nilai t hitung sebesar -0,663 dengan nilai probabilitas (Sig-t) sebesar 0,511 yang nilainya di atas level signifikan 0,05. Sedangkan komite audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia tahun 2014-2018. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 4,470 dengan nilai probabilitas (Sig-t) 0,000049 yang nilainya dibawah 0,05.

Kata Kunci: *Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, ROA*

ABSTRACT

In quality, Islamic banks have not shown significant improvements. According to Infobank Research Bureau records, the performance of sharia banking has not improved since 2012. It appears from the return on assets (ROA) of sharia banking that continues to decline. The average Islamic banking has not been able to reach the ideal ROA standard, which is 1.5%. Profitability that is not optimal can also be caused by moral hazard. It needs the role of independent oversight organs to handle it, such as an independent board of commissioners and an audit committee. This study aims to determine the effect of independent commissioners and audit committees on profitability in Islamic banking in Indonesia in 2014-2018. The variables in this study are independent commissioners and audit committees, while profitability is proxied by ROA.

The population of this research is the Sharia Commercial Bank which operates during the 2014-2018 period, and has published its financial reports on the website of Bank Indonesia and the Financial Services Authority. While the total sample of 10 were taken using the nonprobability method (not randomly) based on criteria (purposive sampling). Data collection techniques were taken based on documentation techniques. Data analysis methods in this study consisted of descriptive analysis and inferential analysis.

The results of this study indicate that the independent board of commissioners and the audit committee simultaneously influence the profitability of Islamic banking in Indonesia in 2014-2018. This result is proven from the calculated F value of 10,534 with a significance value of 0,000166 (<0.05). According to the t test, the proportion of independent commissioners did not significantly and negatively affect the profitability of Islamic banking in Indonesia in 2014-2018. This is evidenced in the t test which shows the calculated t value of -0.683 with a probability value (Sig-t) of 0.511 whose value is above the significant level of 0.05. While the audit committee had a significant and positive effect on the profitability of Islamic banking in Indonesia in 2014-2018. This is evidenced by the calculated t value of 4.470 with a probability value (Sig-t) 0.000049 whose value is below 0.05

Keywords: Independent Board of Commissioners, Audit Committee, ROA.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kekhadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Indonesia Periode 2015-2019” dengan baik. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari tanpa adanya bantuan, bimbingan dan do’a dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik seperti yang diharapkan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Heny Yuningrum, S.E, M.Si, selaku Ketua Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan izin penelitian.
4. Muyassarah, M.Si, selaku Sekretaris Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag, selaku Wali Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Seluruh dosen pengajar Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.

7. Teman-teman seperjuangan Prodi S1 Perbankan Syariah Angkatan 2015 yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan sampai akhir penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga besar Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) Walisongo yang telah berproses bersama saling memberikan bantuan, semangat dan motivasi sehingga penulis mendapatkan pengalaman dan ilmu sebagai bekal untuk menyongsong masa depan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa pengerjaan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berterima kasih atas saran dan kritik yang membangun karena akan sangat bermanfaat guna menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang – orang yang membacanya, Aamiin.

Walaikumsalam Wr. Wb.

Semarang, 05 Desember 2019

Penulis

ARDIAN MAHARDIKA
NIM. 1505036079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Teori Keagenan.....	12

2.2 <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	15
2.2.1 Komisaris Independen.....	19
2.2.2 Komite Audit.....	23
2.2.3 ROA (Return on Asset).....	27
2.3 Penelitian Terdahulu.....	32
2.4 Kerangka Pemikiran.....	41
2.5 Pengembangan Hipotesis.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	46
3.1.1 Jenis Data.....	46
3.1.2 Sumber Data.....	47
3.2 Populasi dan Sampel.....	47
3.2.1 Populasi.....	47
3.2.2 Sampel.....	47
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	48
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	49
3.4.1 Variabel Penelitian.....	49
3.4.2 Definisi Operasional.....	49
3.5 Teknik Analisis Data.....	51
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	51
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	52
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	52

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas.....	52
3.5.3.3 Uji Heteroskedasitas.....	53
3.5.3.4 Uji Autokorelasi.....	53
3.5.3 Uji Hipotesis.....	54
3.5.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda.....	54
3.5.3.2 Uji Signifikansi Parsial (Nilai t).....	54
3.5.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Nilai F).....	55
3.5.3.4 Koefisien Determinasi (R^2).....	55
3.6 Alat Analisis Data.....	56
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	57
4.2 Hasil Analisis Data dan Uji Hipotesis.....	57
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	58
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	59
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	59
4.2.2.2 Uji Multikolinieritas.....	60
4.2.2.3 Uji Heteroskedstisitas.....	62
4.2.2.4 Uji Autokorelasi	64
4.2.3 Uji Hipotesis.....	64
4.2.3.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	64
4.2.3.2 Uji Signifikansi Simultan (F Test).....	66
4.2.3.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	66

4.3. Pembahasan	67
4.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap ROA.....	68
4.3.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap ROA.....	69
BAB V PENUTUP.....	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran.....	72
5.3.1 Bagi Bank Umum Syariah.....	72
5.3.2 Bagi Teoritis.....	72
5.3.3 Bagi Peneliti Selanjutnya.....	72
DAFTAR	
PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Peringkat ROA.....	31
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	41
Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif.....	58
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	59
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas.....	61
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	63
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi.....	64
Tabel 4.6 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual.....	65
Tabel 4.7 Hasil Uji Signifikansi Simultan.....	66
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	66
Tabel 4.9 Keterangan Hasil Uji.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem

keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.¹

Selain itu, manfaat dari pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang diharap mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.² Terutama bagi ekonomi keumatan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim. Prinsip syariah berbasis kemaslahatan yang menjadi ciri khas perbankan syariah harus terus dijaga dengan manajerial yang baik agar kepercayaan nasabah terus meningkat sehingga harapan profitabilitas perbankan syariah dapat berkontribusi bagi perekonomian nasional bisa tercapai.

Di tengah pentingnya profitabilitas keuangan perbankan syariah untuk optimalisasi perekonomian nasional, ternyata kinerja keuangan perbankan syariah saat ini masih jauh dari ideal. Penduduk mayoritas muslim yang seharusnya menjadi pasar besar, ternyata tak menjamin laju perkembangan perbankan syariah cepat. Bahkan, kinerja keuangan bank syariah tak sekinclong bank konvensional. Terdapat masalah *governance* atau tata kelola di bank syariah masih harus terus ditingkatkan, selain keandalan SDM syariah yang sering menjadi soal.

¹BankIndonesia, "Perbankan Syariah", BankIndonesia, Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx>, pada tanggal 27 September 2019 pukul 14.33 WIB.

² *Ibid*

Selama ini cita-cita untuk meraih *market share* di atas 5% memang sudah terpenuhi. Itu pun karena ada konversi bank umum konvensional menjadi syariah. Bukan karena *organic growth*. Seperti konversi Bank BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah.

Penetrasi pasar perbankan syariah memang sudah sedikit membesar, tapi secara kualitas, bank syariah belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Menurut catatan Biro Riset Infobank (birI), kinerja perbankan syariah tak kunjung membaik sejak 2012. Hal ini dapat dilihat dari *return on asset (ROA)* perbankan syariah yang terus menurun. Pada 2012, ROA perbankan syariah masih bertengger di 2,14%, setahun berikutnya menurun dan terus menurun hingga puncaknya terjadi pada 2014 dengan ROA 0,79%. Pada 2017 ROA perbankan syariah sebesar 1,17%. Belum bisa mencapai standar ROA yang ideal, yakni 1,5%. Secara kualitas, perbankan syariah belum membaik. Soal pembiayaan bermasalah masih menjadi pekerjaan rumah.³ Banyak manajemen yang perlu diperbaiki untuk mendongkrak profitabilitas.

Padahal potensi perkembangan perbankan syariah di Indonesia relatif besar. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam perlu terfasilitasi oleh lembaga-lembaga yang taat dengan prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan ciri khas tata kelola perusahaan bank umum syariah dibanding lembaga keuangan lainnya, yakni ketaatan tata kelola perusahaan yang sesuai prinsip islam (*syariah compliance*) yang selalu mengedepankan azas, etika dan nilai-nilai ajaran Islam. Bank umum syariah memiliki semangat memegang teguh ajaran islam, sebagaimana dalam Q.S Almaidah ayat 8, yang berbunyi:

³ Eko B Supriyanto, “perbankan syariah kinerja yang buruk karena tata kelola”, Info Bank News, Diakses dari www.infobanknews.com , pada tanggal 27 September 2019 pukul 14.40 WIB

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَرْحَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ ءَاتَعَدِلُوا أُعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberi dukungan kebijakan yang kuat melalui Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah) yang menyatakan bahwa bunga bank itu riba. Hal ini menjadi modal keunggulan tersendiri bagi bank umum syariah. Namun, faktanya perkembangan perbankan syariah tidak fantastis dari sisi kualitas.⁴ Indikasi bahwa kepercayaan masyarakat terhadap bank umum syariah belum sepenuhnya kuat. Maka, disini diperlukan peran *Corporate Governance* yang baik untuk membangun tata kelola yang professional agar kepercayaan masyarakat terhadap bank umum syariah lebih meingkat dan mampu bersaing dengan bank konvensional.

Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan untuk menentukan arah kinerja perusahaan. Pembahasan mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan karena lemahnya *Corporate Governance* yang diterapkan dalam perusahaan di

⁴Ibid

Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *Corporate Governance*.⁵

Krisis moneter yang menimpa dunia perbankan Indonesia pada 1998 menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan di Indonesia masih lemah. Lemahnya tata kelola perusahaan di sektor perbankan dan pemerintahan di Indonesia menyebabkan tidak adanya *checks and balance* antara formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini terlihat tidak adanya pengawasan terhadap pelampauan dan atau pelanggaran batas minimum pemberian kredit (BMPK), maka ketika terjadi krisis, bank-bank dihadapkan oleh permasalahan BMPK yang cukup besar.

Menyadari hal ini, Bank Indonesia dalam upayanya menata kembali manajemen dan kegiatan perbankan di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tanggal 30 Januari 2006 tentang implementasi GCG oleh Bank-Bank Komersial yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan termasuk kinerja keuangan perusahaan. Menurut Hamdani (2016, 2016:127) Kinerja keuangan perusahaan ditentukan dari sejauh mana perusahaan serius dalam melakukan tata kelola perusahaan yang baik, semakin serius perusahaan menerapkan GCG maka kinerja keuangan perusahaan makin meningkat.⁶ Diantara pihak yang diperhatikan dalam manajerial GCG adalah Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris (DK) memegang peranan penting dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG), karena DK merupakan inti dari corporate governance yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan

⁵Ramiyati, "Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Return On Asset* (Roa) Pada Perusahaan *Food And Beverage* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013 – 2016", *Jurnal Akuntansi FE UMRAH*, 2018, h. 1-2.

⁶ Agung Santoso Putra Dan Nila Firdausi Nuzula, "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas : Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015", *Jurnal Administrasi Bisnis* , 2017, Vol. 47, h. 104

terlaksananya akuntabilitas.⁷ Akuntabilitas yang terlaksana dengan baik dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta akan diiringi pula dengan peningkatan profitabilitas.

Dalam prakteknya, di Indonesia sering terjadi anggota DK sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat mendasar terhadap Dewan Direksi (DD). DK seringkali dianggap tidak memiliki manfaat, hal ini dapat dilihat dalam fakta, bahwa banyak anggota DK tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya. Dalam banyak kasus, DK juga gagal untuk mewakili kepentingan stakeholders lainnya selain daripada kepentingan pemegang saham mayoritas.

Untuk menjamin pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) diperlukan anggota DK yang memiliki integritas, kemampuan, tidak cacat hukum dan independen; serta yang tidak memiliki hubungan bisnis (kontraktual) ataupun hubungan lainnya dengan pemegang saham mayoritas (pemegang saham pengendali) dan Dewan Direksi (manajemen) baik secara langsung maupun tidak langsung. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam RUPS.

Keberadaan Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk (i) meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, (ii) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan

⁷ Tetty Sulestiyo Rini Dan Imam Ghozali, "Pengaruh Pemegang Saham Institusi, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan", *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 1, 2012 h. 5.

dalam pengelolaan perusahaan, (iii) meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta (iv) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Dalam pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris dapat membentuk komite sesuai kebutuhan. Agar mendapat rekomendasi laporan yang akuntabel, Dewan Komisaris biasanya membentuk Komite Audit. Kewenangan Komite Audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu DK, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya sebatas rekomendasi kepada DK), kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari DK, misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus. Peran dan tanggung jawab Komite Audit akan dituangkan dalam Charter Komite Audit yang secara umum dikelompokkan menjadi tiga bagian besar, yaitu financial reporting, corporate governance, dan risk and control management.⁸

Adanya hubungan antara Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Profitabilitas membuat beberapa penelitian melakukan analisis tentang sejauh mana pengaruhnya. Terdapat dua hasil dalam beberapa penelitian. Kelompok pertama mengatakan Dewan Komisaris dan Komite Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan kelompok kedua menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan. Adapun yang mengatakan signifikan adalah penelitian dari Agung Santoso Putra dan Nila Firdausi Nuzulla (2017) yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode (2013-2015))”, menyatakan bahwa secara simultan variabel proporsi dewan komisaris independen, komite audit berpengaruh signifikan terhadap ROA . Hasil yang sama dari penelitian Helfina Rimardhani, R. Rustam Hidayat dan Dwiatmanto(2016) yang meneliti tentang “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2014)”, dewan

⁸ Rini, *Pengaruh....* h. 5

komisaris independen dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan *Return On Asset (ROA)*.⁹

Kelompok kedua yang menyatakan Dewan Komisiner Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, diantaranya penelitian Arifani (2013) yang meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara komisaris independen dan komite audit terhadap kinerja keuangan. Selain Arfani, penelitian Laksana (2015) juga meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitiannya, Dewan Komisiner Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan dan beberapa penelitian di atas, ditemukan *research gap* tentang signifikansi dewan komisaris independen dan komite audit terhadap Profitabilitas. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membuktikan kembali pengaruhnya. Dalam penelitian ini, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit sebagai variabel independen. Profitabilitas sebagai variable dependen diproyeksikan oleh *Return on Assets (ROA)*. Objek penelitian yang digunakan yaitu laporan keuangan perusahaan perbankan syariah yang ada di Indonesia tahun 2014-2018. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul: **“Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Jumlah Komite Audit Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Pada Tahun 2014-2018 ”**.

⁹ Ramiyati, *Pengaruh....* h. 2

¹⁰ Putra, *Pengaruh....* Hal. 104-105

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2014-2018 ?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap Kinerja Profitabilitas Syariah di Indonesia tahun 2014-2018 ?
3. Bagaimana pengaruh Proporsi Komisaris Independen dan Jumlah Komite Audit secara bersama-sama terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2014-2018 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pada umumnya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah tahun 2014-2018.
2. Untuk Mengetahui pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah tahun 2014-2018.
3. Untuk Mengetahui pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Jumlah Komite Audit secara bersama-sama terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah tahun 2014-2018

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya :

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan, serta melatih penulis dalam menerapkan teori yang telah didapat di bangku kuliah. Selain itu, meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis terhadap permasalahan yang terjadi dibidang finansial perusahaan. Dapat dijadikan bahan evaluasi sejauhmana pengaruh proporsi

Dewan Komisaris Independen dan jumlah Komite Audit pada perbankan syariah di Indonesia. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja untuk dapat berjalan lebih baik.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis. serta dapat dijadikan dasar dan referensi penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh proporsi Komisaris Independen dan jumlah Komite Audit terhadap Kinerja perbankan syariah di Indonesia pada tahun tertentu.

c. Bagi Instansi

Digunakan sebagai sarana untuk menuangkan ilmu yang telah didapat khususnya di bidang perbankan syariah dengan memberi masukan terhadap masalah inefisiensi yang dihadapi oleh perusahaan melalui penguatan kebijakan agar sesuai dengan prinsip syariah dan aturan yang ada, guna meminimalisi biaya yang dapat memangkas profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam menyusun penelitian ini terdiri dari lima bab antara lain sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang teori-teori tentang latar belakang masalah dalam penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian serta kerangka pemikiran yang mendukung penggambaran dari alur penelitian.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang variable yang digunakan dalam penelitian ini serta definisi operasional dari variable-variabel tersebut, menentukan populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data serta metode analisisnya.

Bab VI: Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan analisis data statistik deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan juga akan dijelaskan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

Bab V: Penutup

Bab ini adalah terakhir yang mana penulis memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat dalam pemecahan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agen) dengan investor (prinsipal). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan *agent* tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*).

Asumsi teori ini menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Pemilik perusahaan akan memberikan kewenangan pada pengelola (manajer) untuk mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan lainnya untuk dan atas nama pemilik perusahaan. Pengelola tidak bertindak atas kepentingan pemilik, karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict interest*). Dalam teori agensi kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham dan manajer (agen) yang diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang saham.¹¹

Setiap pendelegasian wewenang membawa risiko bahwa agen mungkin tidak berkenan mengikuti kepentingan prinsipal. Jika agen memiliki preferensi dan insentif yang tidak sesuai dengan prinsipal, delegasi dapat menimbulkan masalah agensi (*agency problems*). Permasalahan antara prinsipal dan agen muncul dalam konteks ketika prinsipal tidak mengetahui secara pasti hal yang dilakukan oleh agen, sehingga tidak diketahui kesesuaiannya dengan keinginan prinsipal serta terdapat asimetri informasi.¹²

¹¹ Putra, *Pengaruh....* Hal. 105

¹² Masyiah Kholmi, "Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi", *Ekonomika-Bisnis*, s, Vol. 02 No. 02, 2010 h. 363.

Jika prinsipal mendapatkan informasi sepenuhnya tentang perilaku agen mereka, atau jika mereka mempunyai preferensi sama, sanksi dari prinsipal tidak akan dapat mengubah secara efektif atas perilaku agen. Dari perspektif ini akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai hak prinsipal untuk memperoleh penjelasan dari agen dan hak memberikan sanksi jika agen tidak memenuhi kepentingan prinsipal.

Problem agensi muncul pada informasi yang tidak lengkap dapat berupa informasi tersembunyi (*hidden information*), artinya prinsipal tidak sepenuhnya mengetahui kompetensi atau preferensi agen atau tuntutan yang tepat dari tugas yang diberikan dan atau tindakan tersembunyi (*hidden action*). Sehingga *principal* tidak dapat sepenuhnya mengamati tindakan agen mereka. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tindakan yang berlawanan (*adverse selection*) bagi kepentingan prinsipal yang akhirnya menjadi *moral hazard*. Masalah pertama dapat menyebabkan prinsipal tidak tepat memilih agen yang trampil. Di sisi lain, masalah *moral hazard* muncul ketika agen, memiliki insentif dan kesempatan untuk mengambil tindakan yang tidak teramati yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal.

Agen dapat berbuat nakal (*mishehave*) dalam beberapa cara yang berbeda. Cara agen berbuat *mishehave*, dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) perbedaan pendapat (*dissent*) – kelalaian (*shirking*) (gagal untuk memenuhi prinsipal karena perbedaan dalam preferensi (pilihan) kebijakan, (2) perbedaan waktu luang (*leisure*) – kelalain (gagal untuk memenuhi prinsipal karena pilihan untuk liburan di atas tujuan kebijakan), dan (3) sabotase (aktif merusak tujuan kebijakan prinsipal).¹³

Kenyataannya dalam praktik perusahaan sangat sulit dan tidak mudah konsep prinsipal – agen untuk diterapkan. Kesulitan mendasar pada adanya hubungan kerja prinsipal - agen, yang dalam praktiknya menggunakan dasar kompensasi untuk menilai kinerja dari manajemen. Sedangkan kompensasi

¹³ *Ibid*, h. 364

tersebut besarnya ditentukan berdasarkan target kinerja tertentu yang diukur berdasarkan informasi akuntansi (*earning per share, return on asset, return on equity*) atau berdasarkan harga saham perusahaan.

Kondisi seperti itu kemudian muncul masalah ketidakseimbangan informasi (*asymetry information*). Dalam penyajian informasi, permasalahan timbul ketika pemilik modal dan manajemen memiliki persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan oleh pemilik modal untuk memberikan insentif kepada manajemen (agen).

Manajemen yang memiliki informasi tidak akan memberikan seluruh informasi itu untuk pemilik modal. Akibatnya informasi yang diperoleh prinsipal kurang lengkap, sehingga tetap tidak dapat menjelaskan kinerja agen yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan prinsipal yang telah dipercayakan kepada agen. Ketidakharmonisan antara prinsipal dan agen inilah disebabkan adanya *information asymmetry*. *Information asymmetry* ini pada akhirnya akan mengaburkan makna informasi akuntansi. Kondisi tersebut, ditunjukkan pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa manfaat informasi telah diragukan reliabilitasnya dan akuntabilitasnya dengan fenomena *agency theory*.¹⁴

Akibat adanya informasi yang tidak seimbang ini, dapat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen, permasalahan tersebut adalah: (a) *Moral hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja, (b) *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham (*shareholders*)

¹⁴ *Ibid*

akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun terhadap pemegang saham pada khususnya. Demikian, dalam *agency theory*, pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya ini menimbulkan apa yang disebut *agency costs*, yang menurut teori ini harus dikeluarkan sedemikian rupa sehingga biaya untuk mengurangi kerugian yang timbul karena ketidakpatuhan setara dengan peningkatan biaya *enforcement*-nya.

Agency costs ini mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal, serta biaya yang disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk *'bonding expenditures'* yang diberikan kepada manajemen dalam bentuk opsi dan berbagai manfaat untuk tujuan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Meskipun demikian, potensi untuk munculnya *agency problem* tetap ada karena adanya pemisahan antara manajemen dengan kepemilikan perusahaan.¹⁵

2.2 Good Corporate Governance (GCG)

Corporate Governance diperkenalkan oleh *Cadbury Committee*, Inggris di tahun 1922 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report*. Banyak para ahli yang memberikan pengertian tentang GCG namun pada intinya GCG merupakan suatu perangkat aturan yang mengatur hak dan kewajiban antar *stakeholder* di dalam suatu perusahaan dan mengharuskan suatu perusahaan untuk melakukan transparansi atas semua proses di dalam suatu perusahaan. Prinsip

¹⁵ *Ibid*, h. 365

prinsip GCG adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan.¹⁶

Keberhasilan kinerja suatu perusahaan tergantung pada kualitas manajemen internalnya. Apabila manajemen internal dijalankan sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan para pemangku kepentingan dengan senantiasa menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya maka keberhasilan perusahaan akan dengan mudah dicapai.

Penerapan GCG merupakan salah satu langkah penting bagi perbankan yaitu untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan, mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalitas dan adil, sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada pemegang saham, dewan komisaris, mitra bisnis serta *stakeholders* lainnya. Karena GCG adalah seperangkat peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memeperjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), mencakup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi.

Adapun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan PBI No.4/2006 yang telah diperbarui dengan PBI No.14/2006, sebagai berikut:¹⁷

1. Transparansi

Transparansi bermakna adanya pengungkapan yang akurat dan tepat waktu tentang seluruh hal yang material atas perusahaan, termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. Dalam transaksi di BUS misalnya, pihak penjual harus memberitahu secara transparan harga barang dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan harga dan akad *Ba'i almurabahah* (jual beli barang dengan harga pokok plus keuntungan yang disepakati bersama).

¹⁶ Putra, *Pengaruh....* Hal. 105

¹⁷ Tri Hendro & Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014, hlm 246-247.

2. Akuntabilitas

Praktik pengelolaan BUS harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syariah, sehingga para praktisi BUS sudah sewajarnya mengikuti pelatihan tentang ekonomi syariah secara berkelanjutan. Sumber daya manusia adalah faktor terpenting dalam suatu sistem lembaga keuangan syariah sehingga harus didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Dengan demikian peningkatan pendidikan dan pelatihan khususnya tentang konsep dan praktik lembaga keuangan syariah perlu senantiasa ditingkatkan untuk menghasilkan tenaga ahli lembaga keuangan syariah yang berkualitas. Dalam surat al-Baqarah ayat 282 dijelaskan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن

تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'alahmu itu), kecuali jika mu'alah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

3. Pertanggungjawaban

Prinsip ini menekankan pada kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) BUS, seperti karyawan, nasabah, konsumen, masyarakat, dan lingkungan sekitar, serta pemerintah selaku regulator. BUS diharapkan selalu memelihara kesinambungan nilai tambah tersebut. Disebutkan dalam Q.S al- Anfal ayat 27 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

4. Profesionalitas

BUS harus mengedepankan profesionalisme dan keunggulan layanan (*service excellence*) kepada nasabah. Apabila BUS mampu memberikan pelayanan prima dan profesional serta memiliki kinerja yang unggul, maka dapat dipastikan umat islam akan lebih percaya terhadap BUS.

5. Berkeadilan

BUS perlu mewujudkan prinsip pengelolaan yang berkeadilan sosial, ekonomi, dan distribusi kekayaan. Prinsip keadilan sesungguhnya telah terlihat pada penerapan bagi hasil (*profit sharing*) untuk menggantikan bunga yang dianggap riba. Melalui sistem bagi hasil ini, pemberi modal dan peminjam menanggung bersama risiko laba atau rugi sehingga kekayaan tidak hanya beredar pada satu golongan. Artinya deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*, dengan dana yang dapat digunakan untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Apabila terjadi kerugian, maka bank juga turut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

2.2.1 Komisaris Independen

Menurut POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik , Dewan Komisaris adalah organ emiten atau perusahaan public yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasehat

kepada direksi.¹⁸

Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan dari RUPS yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian dewan komisaris. Dalam pengangkatan dewan komisaris diusulkan oleh anggota RUPS yang memiliki wewenang untuk mengusulkan dewan komisaris.¹⁹

Adapun ketentuan proporsi keanggotaan Dewan Komisaris adalah :²⁰

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau prsiden komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah :²¹

1. Dewan Komisaris bertugasbertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi

¹⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 3

¹⁹ Tetty Sulestiyo Rini Dan Imam Ghozali, “Pengaruh Pemegang Saham Institusi, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan”, Diponegoro Journal Of Accounting, 2012, Vol. 1, Hal.6

²⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Bab III Dewan Komisaris, Pasal 20, Ayat 1-4

²¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Bab III Dewan Komisaris, Pasal 28, Ayat 1-5

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaria wajib membentuk Komite Audit dan membentuk komite lainnya
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

Wewenang Dewan Komisaris :²²

1. Dewan komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
2. Dewan Komisaris dapat nelakukan tindakan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu.
3. Wewenang pada poin 2, ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Dewan Komisaris (DK) memegang peranan penting dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG), karena DK merupakan inti dari corporate governance yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dalam prakteknya, di Indonesia sering terjadi anggota DK sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat mendasar terhadap Dewan Direksi (DD). DK seringkali dianggap tidak memiliki manfaat, hal ini dapat dilihat dalam fakta, bahwa banyak anggota DK tidak

²² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Bab III Dewan Komisaris, Pasal 30, Ayat 1-3

memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya. Dalam banyak kasus, DK juga gagal untuk mewakili kepentingan stakeholders lainnya selain daripada kepentingan pemegang saham mayoritas.

Untuk menjamin pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) diperlukan anggota DK yang memiliki integritas, kemampuan, tidak cacat hukum dan independen; serta yang tidak memiliki hubungan bisnis (kontraktual) ataupun hubungan lainnya dengan pemegang saham mayoritas (pemegang saham pengendali) dan Dewan Direksi (manajemen) baik secara langsung maupun tidak langsung. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam RUPS.²³

Menurut POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.²⁴

Syarat menjadi Dewan Komisaris Independen meliputi :²⁵

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau perusahaan Publik tersebut.

²³ Rini, *Pengaruh....* , h. 4-5

²⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 4

²⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 21, Ayat 2

3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen ekpada RUPS. Pernyataan independensi Komisaris Independen, wajib diungkapkan dalam laporan tahunan. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.²⁶

Komisaris independen dapat bertindak penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberi nasihat kepada manajemen. Dalam penelitian ini proporsi komisaris independen dihitung dengan cara :²⁷

$$\text{Proporsi komisaris independen} = \frac{\Delta \text{Komisaris independen}}{\Delta \text{Dewan komisaris}} \times 100\%$$

2.2.2 Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu

²⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Bab III Dewan Komisaris, Pasal 25, Ayat 1-3

²⁷ Rini, *Pengaruh....* h. 6

melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Audit diketuai oleh komisaris Independen. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Syarat menjadi anggota Komite Audit :

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen resiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Wajib mematuhi kode etik komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan
5. Wajib memiliki paling sedikit 1 anggota yang berlatas belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor jasa Penilaian Publik atau pihak lain yang member jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam 6 bulan terakhir.

7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada public dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbal jasa.
5. Melakukan penelaahan dan pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantauan risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Wewenang Komite Audit :

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Emiten atau Perusahaan Publik yang memiliki Komite Audit wajib memiliki Piagam Komite Audit. Piagam tersebut harus dimuat dalam situs web Emiten atau Perusahaan Publik itu. Piagam Komite Audit memuat :

1. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang
2. Komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan
3. Tata cara dan prosedur kerja
4. Kebijakan penyelenggaraan rapat
5. Sistem pelaporan kegiatan
6. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan
7. Masa tugas Komite Audit.²⁸

Rumus Komite Audit adalah :²⁹

$$\text{Komite Audit} = \Delta \text{ Anggota Audit Per Tahun}$$

2.3 ROA (Return on Asset)

Terdapat beberapa rasio dalam mengukur profitabilitas perusahaan, seperti rasio margin laba bersih, margin laba kotor, ROA (Return on Asset) , dan Return on Equity (ROE). Pada penelitian ini menggunakan proksi atau ukuran profitabilitas perusahaan dengan menggunakan ROA.³⁰ Rasio profitabilitas merupakan salah satu rasio dalam analisis laporan keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan *return on asset*

²⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

²⁹ Iqbal Rijalul Fikri, “Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Leverage Terhadap Integritas Laporan Keuangan”, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Unwagati, 2015, h.6

³⁰ Rini, *Pengaruh.....* h. 6

(ROA). *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba, sehingga apabila nilai ROA semakin tinggi maka dapat dikatakan semakin bagus kinerja perusahaan.

Return On Asses (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika *Return On Asses* (ROA) negatif menunjukkan total aktiva yang di pergunakan tidak memberikan keuntungan atau rugi. *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total asset yang dimilikinya. *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap *total asset* bank tersebut. *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total asset yang dimilikinya. *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap *total asset* bank tersebut.³¹ Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP 2011 rumus perhitungan ROA untuk perbankan adalah sebagai berikut:³²

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Total Aset}}$$

Semakin tinggi rasio ini berarti perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin banyak *Return On Asset* (ROA), berarti kinerja perusahaan semakin efektif, karena tingkat pengembalian akan semakin besar. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan

³¹ Nuzul Ikhwal, "Analisis ROA dan ROE Terhadap Profitabilitas Bank Di Bursa Efek Indonesia" *Jurnal Al Masraf*, 2016, Vol. 1 No. 2 h. 214

³² Putra, *Pengaruh....* Hal. 106

tersebut semakin diminati investor, karena dapat memberikan keuntungan (*return*) yang besar bagi investor. *Return On Asset* kerap kali dipakai oleh manajemen puncak untuk mengevaluasi unit-unit bisnis didalam suatu perusahaan multidivisional. Indikator profitabilitas yang berdasarkan *Return On Asset* (ROA) mempunyai keunggulan sebagai berikut:

1. Merupakan indikator pengukuran yang komprehensif untuk melihat keadaan suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang ada.
2. Mudah dihitung, dipahami dan sangat berarti dalam nilai *absolute*.
3. Merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha.

Selain mempunyai keunggulan *Return On Asset* (ROA) juga memiliki kelemahan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA) membuat manajer divisi memiliki kecenderungan untuk melewatkan *project-project* yang menurunkan divisional *Return On Asset* (ROA), meskipun sebenarnya *projectproject* tersebut dapat meningkatkan tingkat keuntungan perusahaan secara keseluruhan.
2. Manajemen cenderung untuk berfokus pada tujuan jangka pendek dan bukan tujuan jangka panjang.
3. Sebuah project dalam *Return On Asset* (ROA) dapat meningkatkan tujuan jangka pendek, tetapi project tersebut mempunyai konsekuensi negatif dalam jangka panjang yang berupa pemutusan beberapa tenaga penjualan, pengurangan budget pemasaran dan penggunaan bahan baku yang relative murah sehingga menurunkan kualitas produk dalam jangka panjang.

Faktor yang mempengaruhi *Return On Asset* (ROA) sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang dihitung dengan membandingkan aktiva lancar perusahaan dengan kewajiban lancar. Rasio likuiditas ini terdiri dari:

a. *Current Ratio*

Mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dengan membandingkan semua aktiva *likuid* yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban lancar.

b. *Acid Test*

Mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih likuid yaitu tanpa memasukan unsur persediaan dibagi dengan kewajiban lancar.

2. Rasio Manajemen Aktiva

Rasio manajemen aktiva (*Asset Management Ratio*), mengukur seberapa efektif perusahaan pengelola aktivanya. Rasio manajemen aktiva terdiri dari:

a. *Inventory Turnover*

Untuk mengetahui frekuensi pergantian persediaan yang masuk ke dalam perusahaan, mulai dari bahan baki kemudian diolah dan dikeluarkan dalam bentuk produk jadi melalui penjualan dalam satu periode.

b. *Days Sales Outstanding*

Mengetahui jangka waktu rata-rata penagihan piutang dan menjadikan kas yang berasal dari penjualan kredit perusahaan.

c. *Fixet Asset Turnover*

Untuk mengetahui keefektivan perusahaan menggunakan seluruh aktiva tetapnya dengan membandingkan penjualan terhadap aktiva tetap bersih.

d. *Total Asset Turnover*

Untuk mengetahui kefektifan perusahaan menggunakan seluruh aktiva dengan membandingkan penjualan terhadap total aktiva.

3. Rasio Manajemen Utang

Rasio manajemen aktiva bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang (utang)

perusahaan yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas perusahaan. Manajemen utang terdiri dari:

a. Debts Ratio

Mengetahui persentase dana yang disediakan oleh kreditur.

b. Times Interest Earned (TIE)

Untuk mengukur seberapa besar laba operasi dapat menurun sampai perusahaan tidak dapat memenuhi beban bunga tahunan.

c. LoFixed Charge Coverage Ratio

Hampir sama dengan *Times Interest Earned* (TIE), namun mengakui bahwa banyak aktiva perusahaan yang *direlease* dan harus melakukan pembayaran dana pelunasan.³³

Penilaian tingkat kesehatan ROA diklasifikasikan menjadi 5 (lima) peringkat.³⁴

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Peringkat ROA

No.	Kriteria Penilaian Peringkat	Keterangan
1	Peringkat 1, ROA > 1,450%	Sangat Tinggi
2	Peringkat 2, 1,215% < ROA ≤ 1,450%	Tinggi
3	Peringkat 3, 0,999% < ROA ≤ 1,215%	Cukup Memadai
4	Peringkat 4, 0,765% < ROA ≤ 0,999%	Rendah
5	Peringkat 5, ROA ≤ 0,765%	Sangat Rendah

³³ Ikhwail, *Analisis,.....*, h. 214-216

³⁴ Eriza Mayang Kusuma, *Hubungan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Tahun 2011-2012*, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2014, hlm. 6

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan masalah Pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Profitabilitas Bank Syariah ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Ramiyati, 2018, "Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) Pada Perusahaan <i>Food And Beverage</i> Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013 – 2016".	Independen : <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris • Komite Audit • Kepemilikan manajerial • Kepemilikan Institusional Dependen : <ul style="list-style-type: none"> • ROA 	Hasil penelitian terdahulu ini adalah : Dari uji statistik t, menunjukkan bahwa komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ROA. Adapun dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ROA. Secara simultan (Uji Statistik F), Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada penggunaan variabel komisaris independen, komite

			<p>audit, dan ROA. Data yang digunakan juga sama-sama berasal dari data sekunder laporan keuangan. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah objek dan ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian terdahulu, objek penelitiannya adalah objek dalam penelitian ini adalah perusahaan <i>food and beverage</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Ruang lingkup dalam penelitian ini mengenai pengaruh dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap <i>Return On Assets (ROA)</i>.</p>
2.	<p>Agung Santoso Putra & Nila Firdausi Nuzula, 2017, "Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas</p>	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris Independen • Komite Audit • Kepemilikan Manajerial 	<p>Hasil penelitian terdahulu ini adalah :</p> <p>Dari uji statistik t, menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ROA dan ROE. Adapun proporsi dewan komisaris independen,</p>

	<p>(Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)".</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Institusional <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROA • ROE 	<p>komite audit, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ROA dan ROE. Secara simultan (Uji Statistik F), proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap ROA namun tidak signifikan terhadap ROE.</p> <p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada penggunaan variabel komisaris independen, komite audit, dan ROA. Data yang digunakan juga sama-sama berasal dari data sekunder laporan keuangan. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah objek dan ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian terdahulu, objek penelitiannya adalah objek dalam penelitian ini adalah Perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2013-2015.</p>
--	---	--	--

			Ruang lingkup dalam penelitian ini mengenai pengaruh proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajeri, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen terhadap ROE dan ROA sebagai variabel dependen.
3	Desy Helena Lumban Raja, 2016, "Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2014".	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris • Komite Audit <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROA 	<p>Hasil penelitian terdahulu ini adalah :</p> <p>Dari uji statistik t, menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap ROA. Adapun komite audit tidak berpengaruh terhadap ROA.</p> <p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada penggunaan variabel komisaris independen, komite audit, dan ROA. Data yang digunakan juga sama-sama berasal dari data sekunder laporan keuangan. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah objek dan ruang</p>

			lingkup penelitian. Dalam penelitian terdahulu, objek penelitiannya adalah objek dalam penelitian ini adalah perusahaan pada sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2014. Ruang lingkup dalam penelitian ini mengenai pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit terhadap <i>Return On Assets (ROA)</i> .
4.	Helfina Rimardhani, dkk, 2016, “ Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di BEI tahun 2012-2014)”.	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Institusional • Dewan Komisaris Independen • Dewan Direksi • Komite Audit <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROA 	<p>Hasil penelitian terdahulu ini adalah :</p> <p>Dari uji statistik t, menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ROA. Adapun dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ROA. Secara simultan (Uji Statistik F), Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas</p>

			<p>perusahaan yang diukur dengan <i>Return On Asset</i> (ROA).</p> <p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada penggunaan variabel komisaris independen, komite audit, dan ROA. Data yang digunakan juga sama-sama berasal dari data sekunder laporan keuangan. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah objek dan ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian terdahulu, objek penelitiannya adalah objek dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN <i>go public</i> yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. Ruang lingkup dalam penelitian ini mengenai pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan Komite Audit terhadap <i>Return On Assets (ROA)</i>.</p>
5.	Arsanto Teguh Utomo &	Independen : <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan 	Dari uji statistik t, menunjukkan bahwa

	<p>Rahardjo, 2014, “Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012)”.</p>	<p>Institusional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris Independen • Komite Audit • Kualitas Audit <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROA 	<p>kepemilikan institusional dan kualitas audit berpengaruh terhadap ROA. Adapun dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ROA.</p> <p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terlatak pada penggunaan variabel komisaris independen, komite audit, dan ROA. Data yang digunakan juga sama-sama berasal dari data sekunder laporan keuangan. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah objek dan ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian terdahulu, objek penelitiannya adalah objek dalam penelitian ini adalah Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Ruang lingkup dalam penelitian ini mengenai pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan komite audit terhadap <i>Return</i></p>
--	---	---	--

			<i>On Assets (ROA).</i>
6.	Tetty Sulestiyo Rini & Imam Ghozali, , 2012, “Pengaruh Pemegang Saham Institusi, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan”.	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Saham Institusi • Komisaris Independen • Komite Audit <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROA 	<p>Hasil penelitian terdahulu ini adalah :</p> <p>Dari uji statistik t, menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap ROA. Adapun pemegang saham institusi tidak berpengaruh terhadap ROA.</p> <p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada penggunaan variabel komisaris independen, komite audit, dan ROA. Data yang digunakan juga sama-sama berasal dari data sekunder laporan keuangan. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah objek dan ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian terdahulu, objek penelitiannya adalah objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) selama tahun</p>

			<p>2008-2010 dengan berbagai bidang kerja, seperti produksi manufaktur, <i>food and beverages, mining, adhesive, textile, tobacco manufacturers, lumber and wood products, chemical and allied product, automotive, plastics, cement, fabricated glass products, machinery, cable</i>, dan farmasi. Ruang lingkup dalam penelitian ini mengenai pengaruh pemegang saham institusi, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap <i>Return On Assets (ROA)</i>.</p>
--	--	--	---

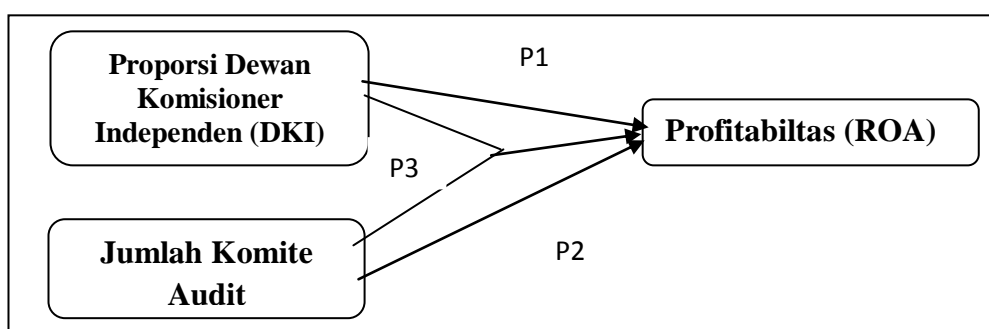
Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian dalam penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penulis berminat menguji kembali pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap profitabilitas (ROA).

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Kerangka Pemikiran Teoritis



Dari kerangka penelitian di atas penulis menggunakan model regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Proporsi dewan komisaris independen dan jumlah komite audit berperan sebagai variabel bebas (independen) sedangkan profitabilitas (ROA) berperan sebagai variabel terikat (dependen). Dalam persamaan satu (P1) menggunakan uji hipotesis berupa uji signifikansi parsial (Nilai t) untuk menilai signifikansi proporsi dewan komisaris independen berperan sebagai variabel independen (X1) terhadap ROA yang berperan sebagai variabel dependen (Y). Lalu persamaan dua (P2) menggunakan pula uji hipotesis berupa uji signifikansi parsial (Nilai t) untuk menilai signifikansi jumlah komite audit yang berperan sebagai variabel independen (X2) terhadap ROA yang berperan sebagai variabel dependen (Y).

Adapun persamaan tiga (P3) menggunakan uji hipotesis berupa uji signifikansi simultan (Nilai F) untuk menilai signifikansi dewan komisaris independen (X1) dan jumlah komite audit (X2) secara bersamaan terhadap ROA yang berperan sebagai variabel dependen (Y).

2.6 Pengembangan Hipotesis

Dari rumusan masalah di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:

Hubungan Proporsi Komisaris Independen terhadap Tingkat Profitabilitas

Dewan Komisaris (DK) memegang peranan penting dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG), karena DK merupakan inti dari corporate governance yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dalam prakteknya, di Indonesia sering terjadi anggota DK sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat mendasar terhadap Dewan Direksi (DD). DK seringkali dianggap tidak memiliki manfaat, hal ini dapat dilihat dalam fakta, bahwa banyak anggota DK tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya. Dalam banyak kasus, DK juga gagal untuk mewakili kepentingan stakeholders lainnya selain daripada kepentingan pemegang saham mayoritas.

Untuk menjamin pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) diperlukan anggota DK yang memiliki integritas, kemampuan, tidak cacat hukum dan independen; serta yang tidak memiliki hubungan bisnis (kontraktual) ataupun hubungan lainnya dengan pemegang saham mayoritas (pemegang saham pengendali) dan Dewan Direksi (manajemen) baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁵

Dalam teori keagenan dinyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang

³⁵ Rini, *Pengaruh....* Hal. 5

tepat untuk menyelaraskan kepentingan antara principal dan agent. Di dalam corporate governance, dewan komisaris bertanggung jawab mengawasi proses pelaporan keuangan dan menilai kualitas tata kelola perusahaan. Dewan komisaris memainkan peran penting dalam memonitor dan mengawasi manajemen. Dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan Terbatas (PT). Di Indonesia dewan komisaris ditunjuk oleh RUPS dan di dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan komisaris. Dewan komisaris adalah fungsi dari perusahaan yang berfungsi melakukan supervisi terhadap dewan direksi. Variabel ini diukur dengan jumlah seluruh dewan komisaris dalam perusahaan.

Diantara dewan komisaris terdapat komisaris independen. Semakin besar proporsi komisaris independen menunjukkan bahwa fungsi pengawasan akan lebih baik. Komisaris independen adalah komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan. Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.³⁶ Independensi yang tinggi membuat dewan komisaris independen maksimal mengawasi laporan keuangan dan tata kelola perusahaan agar tidak terjadi

³⁶ Desy Helena Lumban Raja, "Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2009-2014", *Jurnal Manajemen*, 2016, h. 141-142

masalah keagenan atau pelanggaran perundang-undangan negara dan syariah yang dapat menimbulkan biaya yang dapat memangkas profitabilitas.

H1 : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif dengan tingkat profitabilitas suatu perusahaan

H0 : Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh positif dengan tingkat profitabilitas suatu perusahaan

Hubungan Jumlah Komite Audit terhadap Tingkat Profitabilitas

Menurut teori keagenan, asimetri information muncul karena informasi yang disampaikan manajer kepada pemilik perusahaan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Adanya asimetri information ini dapat menimbulkan dua masalah salah satunya adalah moral hazard. Moral hazard muncul ketika agent dan manajer tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja. Salah satunya adalah kemungkinan kecurangan dalam menyusun laporan keuangan. Komite audit merupakan komite penunjang dewan komisaris yang bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan.³⁷

Keberadaan Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite

³⁷ *Ibid*, h. 142

Audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk (i) meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, (ii) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, (iii) meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta (iv) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Kewenangan Komite Audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu DK, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya sebatas rekomendasi kepada DK), kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari DK, misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus. Peran dan tanggung jawab Komite Audit akan dituangkan dalam Charter Komite Audit yang secara umum dikelompokkan menjadi tiga bagian besar, yaitu financial reporting, corporate governance, dan risk and control management.³⁸ Keberadaan komite audit yang membantu kinerja DK menjadikan DK mampu memaksimalkan pengawasan kebijakannya agar tak terjadi biaya yang mampu memangkas profitabilitas.

H2 : Jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas suatu perusahaan

H0 : Jumlah komite audit tidak berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas suatu perusahaan

³⁸ Rini, *Pengaruh....* Hal. 5

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.1.1 Jenis Data

Berdasarkan jenis data dan analisis, penelitian dibagi menjadi tiga yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bersifat objektif mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik.. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih banyak menggunakan kualitas subjektif, mencakup penelaahan dan pengungkapan berdasarkan persepsi untuk memperoleh pemahaman terhadap fenomena social dan kemanusiaan.³⁹ Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan karakteristik berbagai variabel penelitian dalam situasi tertentu. Penelitian ini dapat pula disebut sebagai penelitian yang menjelaskan fenomena apa adanya. Tujuan dari penelitian ini adalah menyajikan suatu profil atau menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan suatu fenomena yang diteliti dari persepektif individual, organisasi, industri dan persepektif lainnya.⁴⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proporsi dewan komisaris independen dan jumlah komite audit terhadap profitabilitas perbankan syariah periode 2014-2018. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi pustaka. Studi pustaka yaitu usaha untuk mendapatkan data-

³⁹ Asep Hermawan dan Husna Leila Yusran, "Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif", Depok : Kencana 2017, h. 5-6

⁴⁰ *Ibid*, h. 54

data, fakta-fakta ataupun informasi yang umumnya bersifat teori. Studi pustaka bisa didapat melalui buku-buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.1.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.⁴¹ Data penelitian ini berasal dari *Annual Report* (laporan tahunan) yang berasal dari masing-masing *website* resmi bank kemudian dianalisis dengan SPSS. Data ini adalah data *time series* tahun 2014 sampai 2019. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh proporsi dewan komisioner dan jumlah komite audit terhadap profitabilitas bank syariah dari fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴² Populasi data pada penelitian ini adalah 13 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia yang terdapat dalam *website* Otoritas jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan suatu bagian (*subset*) dari populasi.⁴³ Sampel dalam penelitian ini terdapat dalam *annual report* (laporan keuangan) masing-masing bank setiap setahun sekali selama periode 2014-2018.

⁴¹ *Ibid*, h. 115

⁴² Balgis Thayib dan Sri Murni dan Joubert. B. Marami, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional". Jurnal EMBA. Vol. 5 No. 2, 2017, h. 2.

⁴³ Hermawan, *Penelitian...*, h. 97

Secara spesifik, objek yang menjadi sampel penelitian yaitu proporsi dewan komisaris independen, jumlah komite audit dan ROA. Setiap objek memiliki jumlah data yaitu 50 data. Sementara untuk pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu teknik penarikan sampel dengan cara memilih sampel dari suatu populasi didasarkan pada informasi yang tersedia, sehingga perwakilannya terhadap populasi dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁴ Adapun beberapa pertimbangan yang digunakan penulis untuk memilih sampel yaitu :

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2014-2018.
2. Bank Umum syariah yang menyajikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan dipublikasikan di website periode 2014-2018.
3. Data laporan yang diaudit dan dipublikasikan memiliki kelengkapan

Terdapat 10 Bank Umum Syariah yang terpilih berdasarkan criteria di atas, yaitu:

1. Bank Mandiri Syariah
2. Bank Rakyat Indonesia Syariah
3. Bank Negara Indonesia Syariah
4. Bank Muamalat Indonesia
5. Bank Mega Syariah
6. Bank Syariah Bukopin
7. Bank Victoria Syariah
8. Bank Central Asia Syariah
9. Bank Aceh
10. Bank NTB Syariah

3.3 Metode Pengumpulan Data

⁴⁴ Jonathan Sarwono, “Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS : Tuntunan Praktis dalam Menyusun Skripsi”, Elex Media Komputindo : Jakarta, 2012, h. 21

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini melalui media dokumentasi. Metode pengumpulan data melalui dokumentasi dapat dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website*, dan lain-lain. Sementara pada penelitian ini, data diperoleh dari *website* resmi masing-masing bank.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel adalah fenomena yang bervariasi dalam bentuk, kualitas, kuantitas, mutu standar, dan sebagainya.⁴⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel rasio, yaitu variabel yang memiliki permulaan angka nol mutlak.⁴⁶ Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel yang terbagi atas satu variabel terikat (variabel dependen) dan dua variabel bebas (variabel independen) yang meliputi tingkat profitabilitas yang diukur dengan ROA (Y), Proporsi Dewan Komisaris Independen (X1) dan Jumlah Komite Audit (X2).

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang menyatakan secara jelas dan akurat mengenai bagaimana suatu konsep atau konstruksi tersebut diukur. Dapat pula dikatakan sebagai suatu penjelasan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam mengukur suatu konsep. Mengoperasionalkan atau mendefinisioperasionalkan suatu konsep agar dapat diukur dilakukan dengan cara melihat dimensi perilaku, aspek atau karakteristik yang ditunjukkan oleh suatu konsep.⁴⁷ Maka, Definisi operasional merupakan unsur-unsur dari sebuah penelitian yang

⁴⁵ Thayib, *Analisis*....., h. 76

⁴⁶ Thayib, *Analisis*....., h. 79

⁴⁷ Hermawan, *Penelitian*..., h. 63

menjelaskan bagaimana untuk mengukur suatu variabel operasional tersebut mampu menunjukkan indikator-indikator yang menjadi pendukung dari variabel-variabel yang dianalisa. Penjelasan dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

No .	Variabel Penelitian	Definisi	Skala Pengukuran
1.	Proporosi Dewan Komisaris Independen (DKI)	Perbandingan jumlah dewan komisaris independen dibanding dengan jumlah seluruh dewan komisaris dalam waktu satu tahun, lalu diproyeksikan dalam bentuk prosentase.	Proporsi komisaris independen $= \frac{\Delta \text{Komisaris independen}}{\Delta \text{Dewan komisaris}} \times 100\%$
2.	Jumlah Komite Audit	Jumlah seluruh anggota komite audit yang dibentuk Dewan Komisaris dalam waktu satu tahun	Komite Audit $= \Delta \text{Anggota Audit Per Tahun}$

3.	ROA	Rasio <i>Return on Asset</i> (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang membandingkan laba bersih dengan sumber daya atau total aset yang dimiliki, lalu diproyeksikan dalam bentuk prosentase.	$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$
----	-----	--	--

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Analisis data ini merupakan kegiatan setelah data dari laporan keuangan terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah penelitian dalam survey atau observasi yang bertujuan hanya memperoleh informasi dengan menggambarkan suatu kondisi data yang terjadi di lapangan. Pada pengolahan data, dengan melaksanakan

pengujian deskriptif akan menunjukkan tingkat sebaran suatu keadaan di suatu lingkungan, jumlah kejadian, termasuk untuk menentukan tinggi rendahnya suatu masalah atau kondisi yang mengisyaratkan dalam suatu lokasi penelitian atau lokasi pengumpulan data.⁴⁸

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk menguji kelayakan model. Sehingga sebelum dilakukan analisis regresi klasik dan analisis jalur atau path analysis model penelitian harus lolos dalam uji asumsi klasik ini. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Berikut ini merupakan penjelasan dari setiap uji dalam uji asumsi klasik :

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Penelitian ini menggunakan Kolmogorov Sminof (K-S) test dan P-Plot. Kolmogorov Sminof (K-S) test untuk mengetahui normalitas data dengan melihat nilai Asymp. Sig. (2 tailed), apabila nilainya lebih dari 5% maka residual terdistribusi normal. Adapapun P-Plot, bila data berdar di sekitar garis maka persebaran data dianggap normal.

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal dengan kata lain nilai korelasi antar variabel independennya sama dengan nol. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan

⁴⁸ M. Joeharno dan Zamli, "Analisis Data dengan SPSS : Belajar Mudah untuk Penelitian Kesehatan", Buku Kedokteran EGC : Jakarta, 2013, h. 66

adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji scatterplots dan uji glejser untuk mendeteksi apakah model regresi penelitian terdapat heteroskedastisitas atau tidak. Dalam menyimpulkan ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari koefisien parameter beta. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tidak dapat ditolak.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Pengambilan keputusan uji autokorelasi dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin-Watson (D-W) hasil perhitungan dengan nilai tabel Durbin-Watson (D-W). Model dinyatakan memenuhi asumsi non autokorelasi apabila nilai d_u (batas atas nilai D-W tabel) $< d$ (nilai D-W hasil perhitungan) $< (4-d_u)$.

3.5.3 Uji Hipotesis

3.5.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu perubahan kejadian pada variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan kata lain regresi berganda digunakan untuk meramalkan nilai variabel dependen dengan variabel independen yang lebih dari satu. Hubungan yang ditulis antara variabel tak bebas/dependen (Y) dengan variabel bebas/independen (X) :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 \dots + \beta_n X_n + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Terikat

X = Variabel Bebas

α = Konstanta

β = Slope atau Koefisien Estimate

e = Error

Sehingga terbentuklah model persamaan regresi tersebut sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Nilai ROA

$\beta_1 X_1$ = Proporsi Dewan Komisaris Independen

$\beta_2 X_2$ = Jumlah Komite Audit

α = Konstanta

e = Error

3.5.3.2 Uji Signifikansi Parsial (Nilai t)

Uji Signifikansi Parsial (Nilai t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan untuk uji t (parsial) dalam analisis regresi berdasarkan nilai t hitung dan nilai signifikansi.

Dari sisi t hitung, jika t hitung $>$ t tabel, maka variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Namun bila nilai t hitung $<$ t tabel, maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Dari sisi nilai signifikansinya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Namun jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesisnya ditolak atau tidak signifikan.

3.5.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Nilai F)

Uji Signifikansi Simultan (Nilai F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen / terikat. Dasar pengambilan keputusan untuk uji F (simultan) dalam regresi berdasarkan nilai F hitung dan nilai signifikansinya.

Dari sisi nilai F hitungnya, bila nilai F hitung $>$ F tabel, maka variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Namun jika nilai F hitung $<$ F tabel, maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Dari sisi signifikansinya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha 0,05 maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Namun, jika nilai signifikansi lebih besar dari nilai alpha 0,05 maka hipotesis yang diajukan ditolak dan dikatakan tidak signifikan.

3.5.3.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin besar nilai R^2 mendekati 1, maka semakin baik hasil model regresinya. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati 0 maka secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel independen.

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relative rendah karena variasi yang besar antara masing-masing pengamatan,

sedangkan untuk data runtut waktu (time series) biasanya mempunyai data koefisien determinasi yang lebih tinggi.

3.6 Alat Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *IBM SPSS Statistic 23*. *IBM SPSS Statistic 23* merupakan sebuah program computer statistik yang berfungsi untuk membantu dalam memproses data-data statistik secara cepat dan tepat, serta menghasilkan berbagai output yang dikehendaki oleh para pengambil keputusan.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2014-2018. Terdapat Bank Umum Syariah yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah nama-nama sampel Bank Umum Syariah yang menjadi obyek penelitian :

1. Bank Mandiri Syariah
2. Bank Rakyat Indonesia Syariah
3. Bank Negara Indonesia Syariah
4. Bank Muamalat Indonesia
5. Bank Mega Syariah
6. Bank Syariah Bukopin
7. Bank Victoria Syariah
8. Bank Central Asia Syariah
9. Bank Aceh
10. Bank NTB Syariah

4.2 Hasil Analisis Data dan Uji Hipotesis

Selama tahun 2014 - 2018. bank umum syariah yang diambil dalam penelitian ini tercatat sebanyak 10 Bank Umum Syariah yang telah memenuhi syarat kriteria sampel. Karena penelitian ini mengambil sampel dengan metode *purposive sampling*, artinya sampel diambil dari populasi yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun beberapa pertimbangan yang digunakan penulis untuk memilih sampel yaitu :

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2014-2018.
2. Bank Umum syariah yang menyajikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan dipublikasikan di website periode 2014-2018.
3. Data laporan yang diaudit dan dipublikasikan memiliki kelengkapan

Hasil penelitian ini berupa informasi untuk menguji proporsi dewan komisaris independen dan jumlah komite audit berpengaruh pada ROA sehingga akan mempengaruhi manajemen dalam pengambilan keputusan. Sesuai dengan penjelasan permasalahan dan metode yang telah dikemukakan,serta untuk kepentingan pengujian hipotesis makateknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik melalui program SPSS 23.0.

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Berikut adalah hasil statistik deskriptif pada variabel proporsi dewan komisaris independen, jumlah komite audit, dan ROA pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2018 :

Tabel 4.1
Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	50	-2,36	4,65	1,0174	1,38613
DKI	50	40,00	100,00	67,2667	16,33951
KA	50	2	5	3,14	,857
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.1 didapatkan bahwa ROA memiliki nilai minimum sebesar -2,36 yang berarti bahwa nilai terendah yang ada dalam data sampel yang dianalisis adalah -2,36. Kemudian nilai maximum sebesar 4,65 berarti bahwa nilai tertinggi dari data yang dianalisis adalah sebesar 4,65. Nilai mean sebesar 1,01744 berarti bahwa nilai rata-rata data ROA yang dianalisis adalah sebesar 1,0174. Nilai standar deviasi atau simpangan baku sebesar 1,38613 jauh lebih besar dari nilai rata-rata dan berarti bahwa tingkat penyimpangan datanya besar.

Proporsi dewan komisaris independen mempunyai rata-rata sebesar 67,2667. Nilai terendah sebesar 40,00 dan nilai tertinggi sebesar 100,00. Standar deviasi atau simpangan baku sebesar 16,33951 yang berarti bahwa

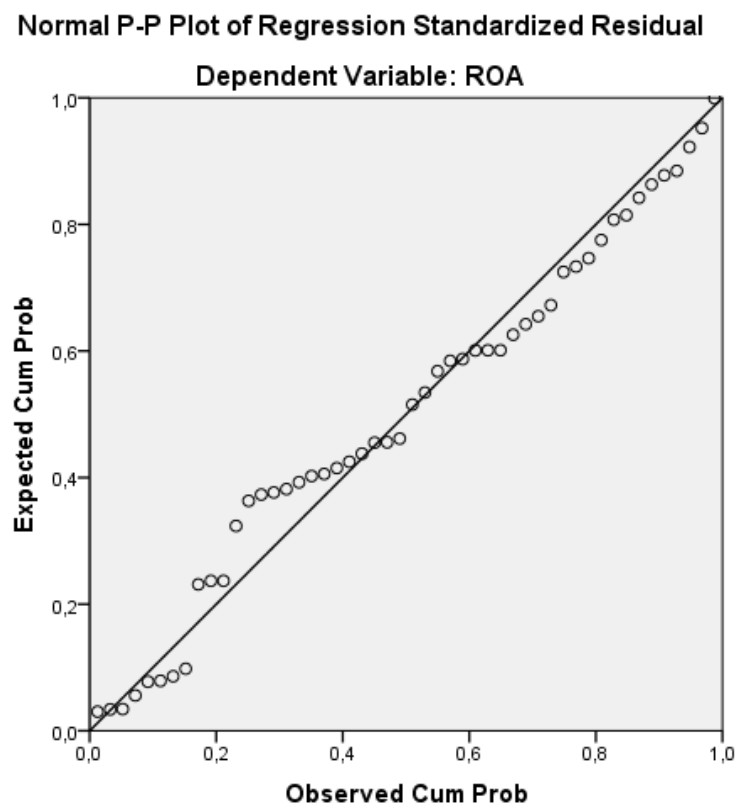
tingkat penyimpangan datanya cenderung kecil. Jumlah komite audit mempunyai rata-rata sebesar 3,14 (dibulatkan menjadi 3). Nilai terendah sebesar 2 dan nilai tertinggi sebesar 5. Standar deviasi atau simpangan baku sebesar 0,857 yang berarti bahwa tingkat penyimpangan datanya cenderung kecil.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi data normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal. Penelitian ini dalam melakukan uji normalitas menggunakan *Uji P-Plot Normality* dan *Uji Kolmogorov-Smirnov*. Dalam tabel 4.2 berikut disajikan hasil dari analisis :

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas



		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,15180683
Most Extreme Differences	Absolute	,120
	Positive	,067
	Negative	-,120
Test Statistic		,120
Asymp. Sig. (2-tailed)		,067 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data sekunder yang telah diolah tahun 2019

Dari grafik normal probability plots titik-titik menyebar berhimpit disekitar diagonal dan hal ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal. Menurut *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, apabila kolmogorov hitung < kolmogorov table, maka data terdistribusi normal. Kolmogorov hitung ditunjukkan dengan nilai *Absolute* pada *Most Extreme Differences* yaitu senilai 0,120. Adapun Kolmogorov tabel n 50 α 0,05 senilai 0,18845. Maka kolmogorov hitung lebih kecil dari kolmogorov tabel. Selain itu nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0,067 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik adalah tidak terdapat korelasi diantara variabel-variabel bebasnya. Uji multikolinieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) dan *tolerance value* tiap-tiap

variabel independen. Pada tabel 4.3 berikut disajikan hasil uji nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) dan *tolerance value*.

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1,283	,981		-1,308	,197		
DKI	-,007	,010	-,081	-,663	,511	,993	1,007
KA	,879	,197	,544	4,470	,000	,993	1,007

a. Dependent Variable: ROA

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	DKI	KA
1	1	2,914	1,000	,00	,01	,01
	2	,067	6,603	,00	,36	,55
	3	,019	12,393	,99	,63	,44

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: Data sekunder yang telah diolah tahun 2019

Pada tabel coefficient, model dapat dianggap tidak multikolerasi bila nilai *standar error* <1, nilai koefisien beta < 1, rentang nilai antara Tolerance dan VIF jauh, nilai *Tolerance* > 0,01, VIF <10, nilai *eigenvalue* > 0,01, dan *condition index* < 30. Pada tabel 4.3 nilai *standar error* Proporsi Dewan Komisaris Independen (DKI) sebesar 0,010. Nilai *standar error* DKI lebih kecil dari 1, maka data tidak terjadi multikoleniaritas. Nilai standar error Jumlah Komite Audit (KA) sebesar 0,197. Nilai *standar error* DKI lebih kecil dari 1, maka data tidak terjadi multikoleniaritas.

Nilai koefisien beta Proporsi Dewan Komisaris Independen (DKI) sebesar -0,81. Nilai ini lebih kecil dari 1, maka menurut koefisien beta, DKI tidak terjadi multikolinieritas. Nilai koefisien beta Jumlah Komite Audit (KA) sebesar 0,544.

Nilai ini lebih kecil dari 1, maka menurut koefisien beta, Jumlah Komite Audit tidak terjadi multikolinieritas.

Selain itu nilai rentangnya juga sempit, nilai *tolerance* DKI sebesar 0,993 dan VIF-nya sebesar 1,007. Sedangkan pada nilai Komite Audit hasilnya sama yaitu *tolerance* Komite Audit sebesar 0,993 dan VIF Jumlah Komite Audit sebesar 1,007. Karena rentang sempit maka multikolinieritas tidak terdeteksi.

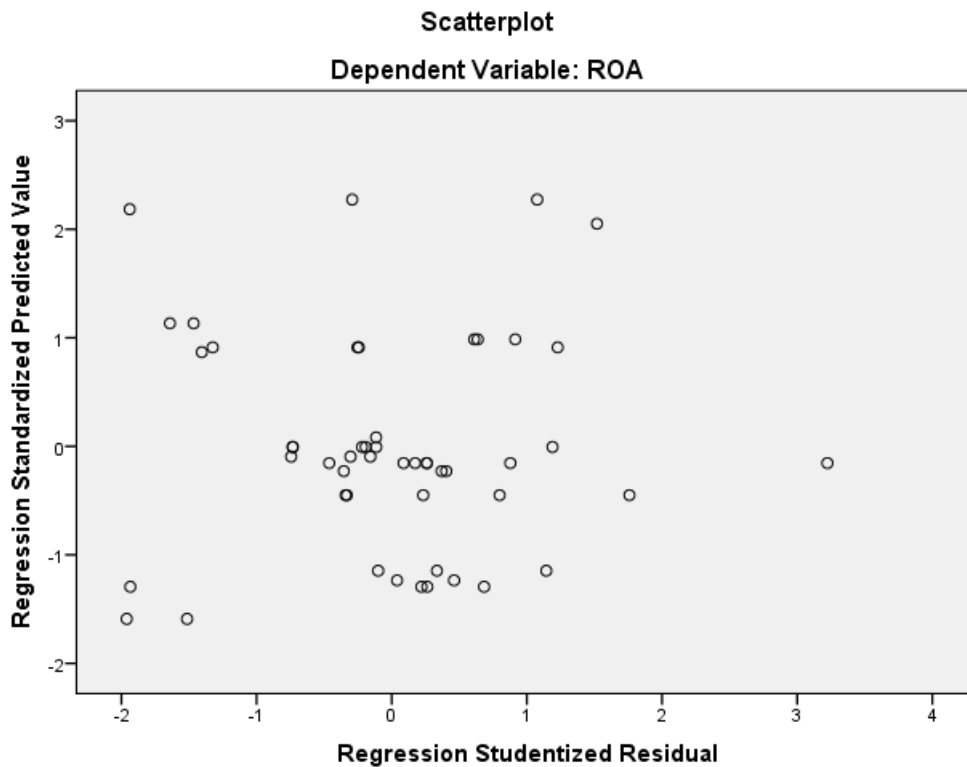
Lalu, nilai VIF dan *Tolerance* pada Proporsi Dewan Komisaris Independen (DKI) dan Jumlah Komite Audit (KA) sama, yaitu VIF sebesar 1,007 dan *tolerance* sebesar 0,993. Nilai VIF ini lebih kecil dari 10 dan *tolerance* lebih besar dari 0,01, maka multikolinieritas

Dalam tabel *Collinieroty Diagnostic*, nilai *eigenvalue* pada Proporsi Dewan Komisaris Independen sebesar 0,067 dan Jumlah Komite Audit sebesar 0,019. Keduanya memiliki nilai lebih dari 0,01. Selain itu, *condition index* pada Proporsi Dewan Komisaris Independen sebesar 6,603 dan Jumlah Komite Audit sebesar 12,393. Karena keduanya lebih kecil dari 30, maka dapat disimpulkan bahwa gejala multikolinieritas tidak terjadi di dalam model regresi ini.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan kepengamatan lain. Jika residual pengamatan kepengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas, sedangkan untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Scatterplot* dan uji *glejser*. Pada tabel 4.4 berikut disajikan hasil uji *Scatterplots* dan *Uji glejser* :

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,286	,627		-,456	,651
DKI	,008	,007	,181	1,280	,207
KA	,182	,126	,205	1,451	,153

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data sekunder yang telah diolah tahun 2019

Pada Grafik Uji *Scatterplot*, terlihat titik-titik menyebar secara acak (random) baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Selain itu pada Uji Glejser, nilai signifikansi (sig.) pada tabel *coefficient* pada Proporsi Dewan Komisaris Indepen (DKI) sebesar 0,207 dan Jumlah Komite Audit (KA) sebesar 0,153. Nilai signifikansi (sig.) kedua variabel lebih dari 0,05. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai untuk memprediksi ROA berdasarkan masukan variabel independen komisaris independen dan komite audit.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengambilan keputusan uji autokorelasi dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin-Watson (D-W) hasil perhitungan dengan nilai tabel Durbin-Watson (D-W). Model dinyatakan memenuhi asumsi non autokorelasi apabila nilai du (batas atas nilai D-W tabel) $< d$ (nilai D-W hasilperhitungan) $< (4 - du)$. Adapun nilai du pada tabel Durbin-Watson = $(k ; n) = (3 ; 50) = 1,6739$ dan $4 - du = 4 - 1,6739 = 2,3261$.

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,556 ^a	,310	,280	1,17606	1,799

a. Predictors: (Constant), KA, DKI

b. Dependent Variable: ROA

Sumber: Data sekunder yang telah diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.5, nilai Durbin-Watson sebesar 1,799 lebih besar dari nilai du sebesar 1,6739 dan lebih kecil dari $4-du$ sebesar 2,3261. Maka dapat disimpulkan bahwa model memenuhi asumsi non autokorelasi.

4.2.3 Uji Hipotesis

4.2.3.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel

terikat. Maka digunakan uji t, dimana $df = n-k-1 = 48-3-1 = 44$, maka t tabel = 0,67986.

Tabel 4.6
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,283	,981		-1,308	,197
DKI	-,007	,010	-,081	-,663	,511
KA	,879	,197	,544	4,470	,000

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: Data sekunder yang telah diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis dari variabel independen terhadap variabel dependen adalah nilai t hitung untuk variabel proporsi dewan komisaris independen (DKI) terhadap ROA menunjukkan -0,663. Berarti $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($-0,663 < 2,01537$), artinya H_0 diterima dan H_a ditolak dengan tingkat signifikansi 0,511. Tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Nilai koefisiensi sebesar -0,07, berarti proporsi dewan komisaris independen hanya mampu menginterpretasikan 0,7% terhadap ROA serta pergerakan nilai DKI berbanding terbalik dengan ROA. Maka DKI secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ROA.

Pada variabel Jumlah Komite Audit (KA) nilai t hitung sebesar 4,470 yang berarti $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ artinya H_a diterima dan H_0 ditolak, Tingkat signifikansi 0,000049. Tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien sebesar 0,879, berarti jumlah komite audit mampu menginterpretasikan 87,9% terhadap ROA serta pergerakan nilai KA bersifat searah. Maka KA secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROA.

4.2.3.2 Uji Signifikansi Simultan (F Test)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Maka digunakan uji F, dimana $F_{tabel} = F(k; n-k) = F(3; 50-3) = F(3; 47) = 2.80$. Bila F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka model dinyatakan signifikan.

Tabel 4.7
Hasil Uji Signifikansi Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	29,140	2	14,570	10,534	,000 ^b
	Residual	65,006	47	1,383		
	Total	94,146	49			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), KA, DKI

Sumber: Data sekunder yang telah diolah tahun 2019

Hasil uji F pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa F_{hitung} yaitu sebesar $10,534 > 2.80$ (F_{tabel}). Nilai signifikansi sebesar $0,000166 (< 0,05)$. Jadi dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen dan jumlah komite audit secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROA.

4.2.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Pada tabel 4.8 koefisien determinasi dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,556 ^a	,310	,280	1,17606

a. Predictors: (Constant), KA, DKI

b. Dependent Variable: ROA

Sumber: Data sekunder yang telah diolah tahun 2019

Berdasarkan output SPSS versi 16.0 diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0.280 atau (28%) . Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen (proporsi dewan komisaris independen dan jumlah komite audit) terhadap variabel dependen (ROA) sebesar 28%, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (proporsi dewan komisaris independen dan jumlah komite audit) mampu menjelaskan sebesar 28% terhadap variabel dependen (ROA). Sedangkan sisanya sebesar 72 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan

Penelitian ini mengenai pengaruh dewan komisaris independen dan komite audit terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2014-2018 mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.9
Keterangan Hasil Uji

Uji t				
Variabel	B	T	Sig	Keterangan
<i>Constant</i>	-1,283	-1,308	0,197	
Proporsi Dewan Komisaris Independen	-0,007	-0,663	0,511	Tidak Berpengaruh
Jumlah Komite Audit	0,879	4,470	0,000049	Berpengaruh
Uji F			0,000166	Berpengaruh
<i>Adjusted R Square</i>				0,028

Adapun hasil model regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = -1,283 - 0,007 X_1 + 0,879 X_2 + e$$

Hasil regresi ini memberikan makna, bahwa nilai konstanta sebesar $-1,283$ berarti jika variabel X (proporsi dewan komisaris independen dan jumlah komite audit) bernilai 0, maka ROA (Y) nilainya negatif, yaitu $-1,283$. Koefisien regresi variabel proporsi dewan komisaris independen (X1) sebesar $-0,007$ berarti jika proporsi dewan komisaris independen mengalami kenaikan 1 persen, maka ROA akan mengalami penurunan sebesar $-0,007$. Koefisien bernilai negative berarti terjadi hubungan yang bertolak belakang antara proporsi dewan komisaris independen dengan ROA. Koefisien regresi variabel jumlah komite audit (X2) sebesar $0,879$ berarti jika jumlah komite audit mengalami kenaikan 1 orang, maka ROA akan mengalami kenaikan sebesar $0,879$. Koefisien bernilai positif berarti terjadi hubungan searah antara jumlah komite audit dengan ROA.

4.3.1 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap ROA

Bedasarkan hasil uji statistik t menunjukkan nilai t hitung sebesar $-0,663$ yang lebih kecil dari t tabel $0,67986$. Nilai probabilitas (Sig-t) sebesar $0,511$ yang nilainya di atas level signifikan $0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol tidak berhasil ditolak atau dapat dinyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ROA Bank Umum Syariah pada tahun 2014-2018. Sehingga hipotesis pertama (HA1) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah tahun 2014-2018 **ditolak**.

Pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Besarnya proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap naik turunnya ROA. Hal ini diduga karena proses seleksi komisaris independen belum efektif dan optimal. Dapat dilihat dari nilai rata-rata sampel proporsi komisaris independen yang sebesar $67,2667\%$ dari jumlah dewan komisaris. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa dewan komisaris independen telah mendominasi proporsi dewan komisaris, namun belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ROA.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan *agency theory* yang menjelaskan bahwa pengawasan yang tepat dapat mengurangi konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*. Adanya dewan komisaris yang independen akan meningkatkan kualitas fungsi pengawasan dalam perusahaan. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin besar proporsi komisaris independen menunjukkan bahwa fungsi pengawasan akan lebih baik. Dari fungsi pengawasan yang baik dalam mekanisme kerja, kebijakan, dan ketaatan regulasi akan terjadi kenaikan profitabilitas.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Desy Helena (2016) yang menyatakan bahwa adanya proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Proporsi dewan komisaris independen bukan merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi profitabilitas.

4.3.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap ROA

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan tabel 4.6, jumlah komite audit memiliki nilai t hitung sebesar 4,470 yang berarti $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ (0,67986) dan signifikansi sebesar 0,000049 ($< 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak atau dapat dinyatakan bahwa jumlah komite audit berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap ROA bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2014-2018. Sehingga hipotesis kedua (HA2) yang menyatakan komite audit berpengaruh signifikan terhadap ROA bank umum syariah pada tahun 2014-2018 **diterima**.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori bahwa Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Komite Audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk (i) meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, (ii) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, (iii) meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta (iv) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Keberadaan komite audit berhasil mempengaruhi

profitabilitas perusahaan karena semakin efektif pengawasan komite audit akan membuat kinerja perusahaan optimal sehingga akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

Hasil ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Tetty Sulestiyono (2012) yang menyatakan bahwa adanya jumlah komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Komisaris independen bukan merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi profitabilitas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Jumlah Komite Audit terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2014-2018 dimana jumlah sampel yang diteliti terdapat 10 yang menjadi target penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2014-2018, yang ditunjukkan arah nilai koefisien regresi pada variabel proporsi dewan komisaris independen yang bernilai negatif (-0,007) yang berarti pengaruhnya hanya sebesar 0,7% serta pergerakan nilai variabel X dan Y bersifat berbanding terbalik. Adapun perolehan nilai signifikan sebesar 0,511 ($> 0,05$) yang berarti tidak signifikan.
2. Jumlah komite audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2014-2018, yang ditunjukkan arah nilai koefisien regresi pada variabel jumlah komite audit yang bernilai positif (0,879) yang berarti pengaruhnya sebesar 87,9% serta pergerakan nilai variabel X dan Y bersifat searah. Adapun perolehan nilai signifikan sebesar 0,000049 ($< 0,05$) yang berarti signifikan.
3. Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2014-2018. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji F yang menunjukkan bahwa F hitung sebesar 10,534 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000166.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi bank umum syariah dalam mengambil keputusan manajemen terkait jumlah personil/ukuran beberapa elemen dalam bank umum syariah.

2. Saran Teoritis

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih sedikit. Sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel-variabel independen lain yang secara teoritis berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya yaitu:

- Penelitian selanjutnya agar menggunakan variabel yang lebih banyak dan berbeda serta periode penelitian yang lebih panjang untuk dapat mengetahui efek pengaruh dewan komisaris independen dan komite audit terhadap profitabilitas
- Memperluas kriteria sampel dengan menggunakan bank umum syariah dengan jumlah aset tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, “Perbankan Syariah”, Bank Indonesia, Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx>, pada tanggal 27 September 2019 pukul 14.33 WIB
- Bungin, Burhan, “Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi : Format-Format Kuantitatif untuk Studi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran”, Prenadamedia Group : Jakarta, 2002.
- Fikri, Iqbal Rijalul, “Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Leverage Terhadap Integritas Laporan Keuangan”, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Unwagati, 2015.
- Haslinda dan Jamaluddin M, “Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi dengan Standar Biaya Sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo”, Akuntansi Peradaban, Vol. II, 2016.
- Hastuti, Rahajeng Kusumo, “Perbankan Syariah Masih Sulit Bersaing Dengan Konvensional”, CNBC Indonesia, Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190607133414-29-77037/perbankan-syariah-masih-sulit-bersaing-dengan-konvensional> pada tanggal 6 September 2019 pukul 22.44 WIB
- Hendro, Tri & Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014.
- Hermawan, Asep dan Husna Leila Yusran, “Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif”, Depok : Kencana 2017,
- Ikhwal, Nuzul, “Analisis ROA dan ROE Terhadap Profitabilitas Bank Di Bursa Efek Indonesia”, Jurnal Al Masraf, 2016, Vol. 1 No. 2 h. 214
- Joeharno, Muhammad dan Zamli, “Analisis Data dengan SPSS : Belajar Mudah untuk Penelitian Kesehatan”, Jakarta : Buku Kedokteran EGC 2013.
- Kholmi, Masyah, “Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi”, Ekonomika-Bisnis, s, Vol. 02 No. 02, 2010.
- Kusuma, Eriza Mayang, *Hubungan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Tahun 2011-2012*, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2014.
- Novika, Soraya, “Market share perbankan syariah kuartal I-2019 turun”, [alinea.id](https://www.alinea.id/bisnis/market-share-perbankan-syariah-kuartal-i-2019-turun-b1XeF9j1v), Diakses dari <https://www.alinea.id/bisnis/market-share-perbankan-syariah-kuartal-i-2019-turun-b1XeF9j1v> pada tanggal 7 september 2019 pukul 00.23 WIB
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- Putra, Agung Santoso Dan Nila Firdausi Nuzula, “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas : Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 47, 2017.
- Raja, Desy Helena Lumban, “Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2009-2014”, *Jurnal Manajemen*, 2016, h. 141-142
- Ramiyati, “Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Return On Asset* (Roa) Pada Perusahaan *Food And Beverage* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013 – 2016”, *Jurnal Akuntansi FE UMRAH*, 2018.
- Rini, Tetty Sulestiyono Dan Imam Ghozali, “Pengaruh Pemegang Saham Institusi, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan”, *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 1, 2012.
- Rusydiana, Aam Slamet, “Efisiensi Dan Stabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 11, 2018.
- Sarwono, Jonathan, “Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS : Tuntunan Praktis dalam Menyusun Skripsi”, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2012.
- Setiawan, Budi, “Menganalisa Statistik Bisnis dan Ekonomi dengan SPSS 21”, Yogyakarta : Andi Offset, 2013.
- Supriyanto, Eko B, “perbankan syariah kinerja yang buruk karena tata kelola”, *Info Bank News*, Diakses dari www.infobanknews.com , pada tanggal 27 September 2019 pukul 14.40 WIB
- Thayib ,Balgis dan Sri Murni dan Joubert. B. Marami, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional”. *Jurnal EMBA*. Vol. 5 No. 2, 2017.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Sampel Data ROA, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit

Perbankan Syariah Tahun 2014-2018

No.	Nama Bank	Tahun	ROA	DKI	KA
1	BANK ACEH	2014	3.13	75	4
2		2015	2,83	66.66667	4
3		2016	2,48	66.66667	4
4		2017	2,51	66.66667	4
5		2018	2,38	50	3
6	BCA Syariah	2014	0,8	66.66667	2
7		2015	1,0	66.66667	3
8		2016	1,1	66.66667	3
9		2017	1,2	66.66667	3
10		2018	1,2	66.66667	3
11	BNI Syariah	2014	1,27	75	3
12		2015	1,43	75	4
13		2016	1,44	75	4
14		2017	1,31	75	3
15		2018	1,42	50	2
16	BRI Syariah	2014	0,08	80	4
17		2015	0,76	60	3
18		2016	0,95	40	3
19		2017	0,51	50	2
20		2018	0,43	75	3
21	Bukopin Syariah	2014	0,27	66.66667	2
22		2015	0,79	50	3
23		2016	0,76	50	3
24		2017	0,02	50	4
25		2018	0,02	50	2
26	Mandiri Syariah	2014	0,17	50	3
27		2015	0,56	60	5
28		2016	0,59	60	2
29		2017	0,59	60	3
30		2018	0,88	50	3
31	Mega Syariah	2014	0,29	100	3
32		2015	0,30	100	3
33		2016	2,63	100	3

34		2017	1,56	100	3
35		2018	0,93	100	3
36	Muamalat	2014	0,17	50	3
37		2015	0,20	75	4
38		2016	0,22	50	4
39		2017	0,11	60	2
40		2018	0,08	60	3
41	NTB Syariah	2014	4,65	66.66667	3
42		2015	4,27	75	5
43		2016	3,95	50	5
44		2017	2,45	50	5
45		2018	1,92	66.66667	3
46	Victoria Syariah	2014	-1.87	100	2
47		2015	-2.36	100	2
48		2016	-2.19	66.66667	2
49		2017	0,36	66.66667	3
50		2018	0,32	66.66667	2

Sumber: data laporan keuangan tahunan bank 2014-2018

STATISTIK DESKRIPTIF

Lampiran 2

Uji Statistik Deskriptif variabel ROA,DKI, dan KA

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	50	-2,36	4,65	1,0174	1,38613
DKI	50	40,00	100,00	67,2667	16,33951
KA	50	2	5	3,14	,857
Valid N (listwise)	50				

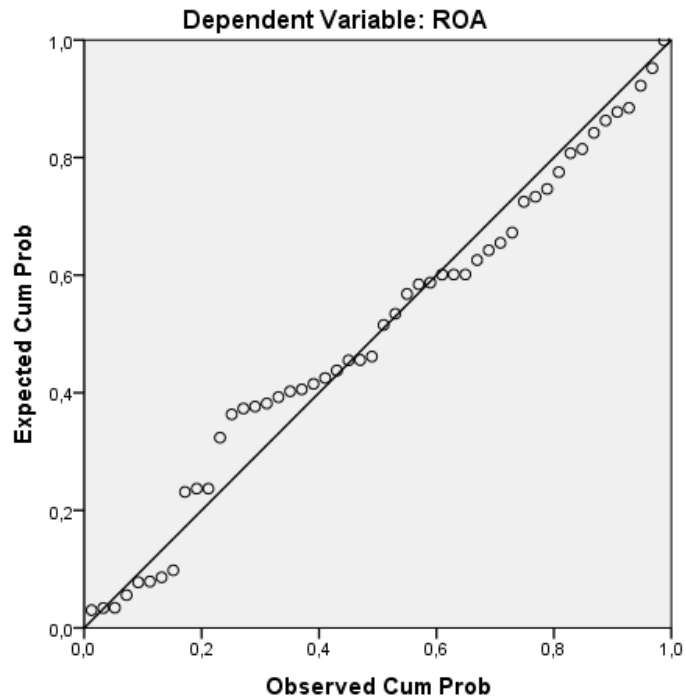
Sumber: Data Sekunder yang telah diolah

UJI ASUMSI KLASIK DAN UJI HIPOTESIS

Lampiran 3

Uji Asumsi Klasik Dan Uji Hipotesis

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,15180683
Most Extreme Differences	Absolute	,120
	Positive	,067
	Negative	-,120
Test Statistic		,120
Asymp. Sig. (2-tailed)		,067 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1,283	,981		-1,308	,197		
	DKI	-,007	,010	-,081	-,663	,511	,993	1,007
	KA	,879	,197	,544	4,470	,000	,993	1,007

a. Dependent Variable: ROA

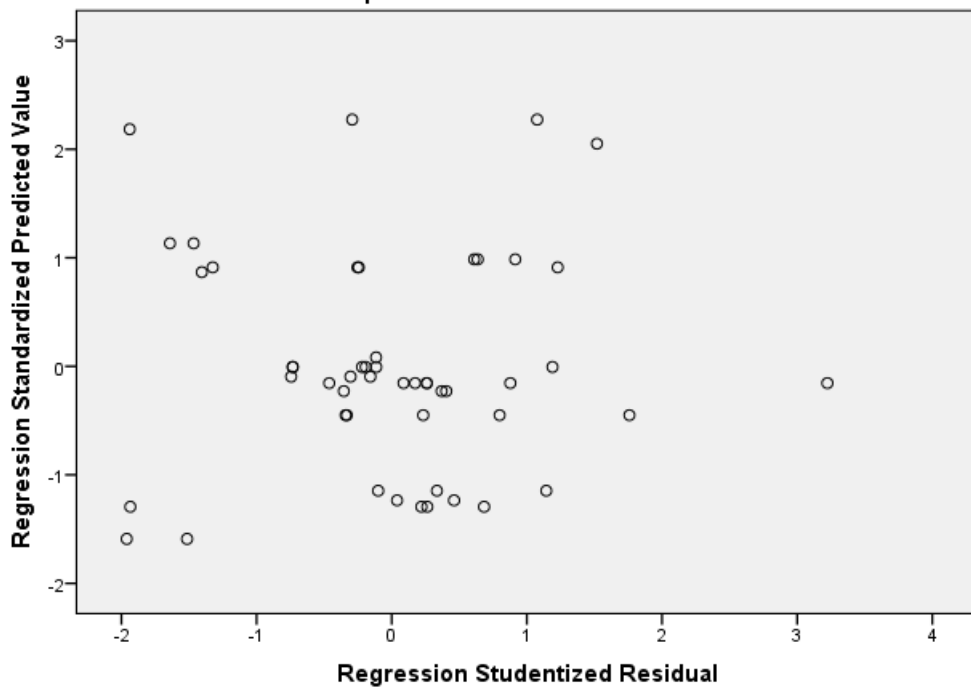
Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	DKI	KA
1	1	2,914	1,000	,00	,01	,01
	2	,067	6,603	,00	,36	,55
	3	,019	12,393	,99	,63	,44

a. Dependent Variable: ROA

Scatterplot

Dependent Variable: ROA



Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,556 ^a	,310	,280	1,17606	1,799

a. Predictors: (Constant), KA, DKI

b. Dependent Variable: ROA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,286	,627		-,456	,651
	DKI	,008	,007	,181	1,280	,207
	KA	,182	,126	,205	1,451	,153

a. Dependent Variable: ABS_RES

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,283	,981		-1,308	,197
	DKI	-,007	,010	-,081	-,663	,511
	KA	,879	,197	,544	4,470	,000

a. Dependent Variable: ROA

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	29,140	2	14,570	10,534	,000 ^b
	Residual	65,006	47	1,383		
	Total	94,146	49			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), KA, DKI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,556 ^a	,310	,280	1,17606

a. Predictors: (Constant), KA, DKI

b. Dependent Variable: ROA

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Ardian Mahardika
Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 16 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Dk. Sidorejo RT 04 RW 02 Ds.Daren Kec.
Nalumsari Kab. Jepara 59466
Contact Person : 089662153832
Nama Orang Tua :
Ayah : Abdul Rakhman Said (Alm.)
Pekerjaan : Guru
Ibu : Sudarlin
Pekerjaan : Pedagang
Alamat Orang tua : Dk. Sidorejo RT 04 RW 02 Ds.Daren Kec.
Nalumsari Kab. Jepara 59466
Pendidikan : MI An-nur Daren lulus tahun 2008
MTs NU TBS Kudus lulus tahun 2011
MA NU TBS Kudus lulus tahun 2014
S1 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang
angkatan 2015

Semarang, 5 Desember 2019

Penulis,



ARDIAN MAHARDIKA

NIM.1505036079